

perselisihan klaim wilayah di Laut Cina Selatan oleh Cina. Pengoperasian tujuh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) di perairan Natuna ditegaskan tidak terkait dengan memanasnya situasi di sana. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi menegaskan, hubungan Indonesia dengan Cina masih harmonis sejauh ini. "Ada apa memang di Natuna? Kemarin saya bertemu panglima atau KSAL Cina baik-baik saja," ujarnya di sela-sela HUT Ke-70 Marinir di Lapangan Apel Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta, kemarin (15/11). KASAL RI menerangkan, pengoperasian tujuh KRI sebatas patroli yang merupakan salah satu rutinitas jajarannya. Karena itu, imbuh dia, hal tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan isu seputar klaim wilayah oleh Tiongkok. Selain Indonesia, zona ekonomi eksklusif beberapa negara lain juga masuk di peta tersebut. Mereka adalah Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Khusus Filipina, salah satu negara di ASEAN itu bahkan telah mengadukan Tiongkok ke Mahkamah Internasional.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam pusaran konflik di Laut Cina Selatan. Ryamizard menegaskan, posisi Indonesia di kawasan tersebut justru menjadi mediator. "Cina bilang Laut Cina terbuka, halaman kita bersama," ungkap Ryamizard di kantornya Jumat lalu (13/11). Menyikapi ketegangan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hanya menyampaikan harapan agar situasi yang ada tidak sampai mengganggu jalur perdagangan di kawasan itu. "Indonesia menjamin Laut Cina Selatan sebagai perairan yang bebas untuk perdagangan," ucap JK di Jakarta Sabtu (14/11) (Jpnn (online 15 Desember 2015)

Pemerintah Indonesia di era Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB. Garis putus-putus yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia berang. Padahal RI sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik akibat Laut Cina Selatan. Usut punya usut, klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.

Cina sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akibat klaim mereka di Kepulauan Spratly. Lima tahun terakhir, PBB belum bersikap atas protes dari pemerintah Indonesia. China juga tidak pernah menyinggung isu itu, sehingga hubungan Beijing- Jakarta relatif adem ayem.

Tapi, sejak jauh-jauh hari TNI sudah menyadari potensi konflik melibatkan Natuna. Lebih dari 20 ribu personil TNI dikerahkan menjaga perairan dengan cadangan gas terbesar di Asia mulai 1996. Setelah berkuasa, Presiden Jokowi hendak menegaskan sikap terhadap Natuna, lebih keras dari sikap SBY. "Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Cina dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun," ujarnya saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun (merdeka.com : 15 Desember 2015).

Untuk mengatasi masalah klaim Cina atas wilayah Kepulauan Natuna, pemerintah Indonesia melakukan Diplomasi Bilateral dengan membawa data yang lengkap sebagai bukti pemilikan Kepulauan Natuna sah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diplomasi yang dilakukan oleh Kemlu RI dapat meyakinkan pemimpin Cina bahwa Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia. Keberhasilan Indonesia melakukan diplomasi dibuktikan